



KLIPING

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Sumber Berita: **RADAR TARAKAN**

TANGGAL:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
		√																													

BULAN:

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
			√								

TAHUN

2017

HALAMAN

A1

KTT Optimis Raih WTP Tahun Ini

Menggunakan Asas Kehati-hatian dalam Membuat Laporan

TARAKAN - Kabupaten Tana Tidung (KTT) menjadi satu-satunya kabupaten di Kalimantan Utara (Kaltara) yang tidak hadir saat menyerahkan laporan keuangan tahun 2016, meski begitu Bupati KTT, Undunsyah optimis akan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Alasan mendasar KTT menunda untuk menyerahkan laporan, karena adanya sistem pada dokumen yang akan diserahkan belum rampung. Sehingga keputusan untuk menunda diambil pihaknya. "Kami ingin *review* hasil yang baik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maka asas kehati-hatian dan ketelitian harus kami lakukan, tidak boleh gegabah. Sehingga kami tunda dan minta dijadwalkan penyerahan Senin besok," ungkap Undunsyah, Bupati KTT, kemarin (1/4).

Pemeriksaan pertama menurut Undun bukanlah, penentuan untuk menentukan opini. Opini terjadi apabila terdapat perubahan dalam melaksanakan dan mendapatkan temuan, lalu melaksanakan rekomendasi perbaikan yang telah diberikan opini saat pemeriksaan pertama.

"Jadi opini itu dapat berubah saat pemerintah konsekuen dan berkomitmen untuk menyelesaikan beberapa hasil pemeriksaan, pada pemeriksaan awal yang dilakukan oleh BPK," ungkap ayah 5 orang anak itu.

Dia mengakui ketidak hadirannya dalam penyerahan laporan karena, ada beberapa sistem yang terlebih dahulu harus diperbaiki, karena ia tak ingin hasil laporan yang diserahkan asal-asalan. "Saya sudah siap, hanya sistem dokumen yang belum siap. Jadi kami minta untuk diberikan waktu lagi," ungkap Undun.

Pada dasarnya tidak akan ada yang menginginkan terlambat dalam menyerahkan laporan, begitupun Undunsyah yang memiliki prinsip walaupun harus terlambat, dia tak akan mengabaikan ketelitian agar dapat menghindari kelalaian dalam mem-

perhatikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan tahun ini, ia tak ingin mendapatkan opini itu lagi sehingga optimis mendapatkan WTP karena masih banyak kemungkinan yang dapat terjadi.

"Saya konsisten dengan staf, apa yang harus dilaksanakan segera. Jadi rekomendasi yang bisa diselesaikan segera akami kami selesaikan, jika tidak bisa yah sudah. Intinya saya berkomitmen untuk membangun KTT," ujar Undun.

Untuk diketahui, Jumat (31/3) 4 dari 5 kabupaten kota di Kaltara telah menyerahkan laporan keuangan anggaran tahun 2016 kecuali KTT. Keterlambatan KTT dalam menyerahkan laporan dapat mengakibatkan, KTT akan sulit mendapatkan opini WTP tahun ini.

Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kaltara, Tornanda Syaifulah mengatakan, ketika menyerahkan laporan keuangan haruslah lengkap, karena jika tidak lengkap laporan tahunan itu tentu akan segera dikembalikan ke pemerintah kabupaten/kota.

"Seperti KTT, sebenarnya mereka sudah menyerahkan tetapi ada satu catatan laporan keuangan yang belum selesai, kemungkinan Senin besok sudah lengkap. Sebenarnya sudah diberikan waktu 3 bulan untuk menyusun laporan dan itu waktu yang cukup lama," tutur Tornanda.

Ketika laporan keuangan terlambat, BPK tidak akan memberikan sanksi, tetapi keterlambatan akan menjadi bagian pertimbangan dalam memberikan opini. Yang jelas

serahkan, menurut ketentuan BPK hanya diberikan waktu 2 bulan untuk mengaudit. Rencananya awal Juni sudah dapat disampaikan ke daerah-daerah di Kaltara apakah akan ada yang mendapatkan kategori laporan WDP ataukah WTP.

"Yang membuat nilai bukan kami, yah jika daerah yang mendapatkan kategori WTP kami akan sangat senang. Itu artinya akan dilihat bagaimana keseriusan tiap daerah dalam menyusun dan mempertanggungjawabkan laporan yang mereka buat," jelas Tornanda.

BPK menilai kewajaran atas laporan keuangan itu bukanlah mencari kebenaran atau kesalahan, mengingat yang dinilai ada 4 indikator yaitu apakah laporan dapat diselesaikan secara wajar dan mengikuti standar yang ada, lalu berdasarkan sistem penilaian internal apakah sesuai dengan yang disusun atau diterapkan sudah memadai atau belum, masalah ketaatan terhadap peraturan perundangan, dan pengungkapan penuh terhadap pelaporan keuangan itu.

"Jadi atas dasar 4 penilaian ini kami pertimbangkan apakah masalah-masalah ini mempengaruhi atau tidak terhadap laporan pertanggung jawaban," jelas Tornanda.

Untuk diketahui, laporan keuangan tahun 2015 lalu pada Pemerintahan Provinsi Kaltara, kabupaten kota yang mendapatkan WTP yakni Tarakan, Nunukan, dan Malinau, sedangkan yang mendapatkan WDP yaitu Kabupaten Tanah Tidung dan Bulungan. (*/yus/nri)